



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 24 Maret 2023

Nomor : 130/004893  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati Pati

Kepada  
Yth. Bupati Pati  
di –  
PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/445 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Fasilitasi Raperbup Kabupaten Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2028, sebagai berikut:

1. Konsideran "menimbang" agar disesuaikan kembali unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dasar Hukum "mengingat" agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Agar ditambahkan pengaturan mengenai:
  - a. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.
  - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam RPB setiap tahun selama periode RPB.
  - c. Review RPB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan kegiatan secara signifikan.
  - d. Pelaporan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.